

## Referensi

- (Inpres nomor 7. (1999). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Vol. 1).
- (Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8. (2003). *Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003* (p. 43). <http://monev.bps.go.id/esakip/Pustaka/SK-LAN-239-2003-SAKIP.pdf>
- (Peraturan Menteri PANRB No. 88. (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021. In Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021* (Vol. 151, Issue 2, pp. 10–17).
- (PERMENPANRB 25. (2012). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012* (p. 111).
- (PERMENPANRB No.12. (2015). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015. In Ekp* (Vol. 13, Issue 3, pp. 1576–1580).
- Afilu Hidayattullah, I. H. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran ANggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Merauke. *SENDI\_U*, 978–979.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150–159. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454>
- AR, M., Syamsidar, S., & Efendy, D. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 95–101. <https://doi.org/10.35130/jrimk.v2i2.21>
- BPK RI. (2021). *BPK: Akuntabilitas Bagian Penting Dalam Pencegahan Korupsi*. <https://jakarta.bpk.go.id/bpk-akuntabilitas-bagian-penting-dalam-pencegahan-korupsi/>
- Budiono, J. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 1–31. <https://doi.org/10.33772/jak-uh.v6i2.22216>
- Dewi, P. C. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal , Kejelasan Sasaran Anggaran , Pergantian Kepala OPD , dan Kinerja ( Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Purworejo ). *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*.
- Donaldson dan Davis. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi Ke-10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariato, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Krismawati, A. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Di Pemerintah Kota Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 01(01), 8–26.
- Menpan RB. (2017). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil*

- Negara. *Jakarta: Sekretariat Negara*, 108.
- MenpanRB. (2022a). *Kementian PANRB Memodernkan Pedoman Evaluasi AKIP*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementian-panrb-memodernkan-pedoman-evaluasi-akip>
- MenpanRB. (2022b). *Permasalahan dan tindak lanjut ke depan*. <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/permasalahan-dan-tindak-lanjut-ke-depan>
- Menteri, P., Negeri, D., Indonesia, R., & Lembaran, T. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013*. 61, 1–15.
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192–212. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.463>
- N.L Supadmi, D. . D. S. (2018). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan keuangan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 13(2), 132–145.
- Nursasi, A. (2022). *Dampak Korupsi Terhadap Pelayanan Publik*. <https://geotimes.id/opini/dampak-korupsi-terhadap-pelayanan-publik/>
- Pebrianti, S., & Aziza, N. (2019). Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting Systems, Compliance with Regulation on Performance Accountability of Government Agencies. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 292, 396–410. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.62>
- Perbup Nomor 56. (2021). *Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2021*.
- Perpres. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014*.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429–444. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.85>
- Rahman, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Journal of Management*, 4(2), 257–270. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.334>
- Ramadhania, S., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 807–813.
- Reza Pridima Putri, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun. *Journal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(2), 336–348.
- Safira, F., Sari, K. R., & Aryani, Y. A. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang. *Journal Scientific of Mandalika*, 3(7), 1116–1133.
- Sanjeev Gupta, Hamid Davoodi, and R. A.-T. (1998). Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty? *IMF Working Papers*, 98(76), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451849844.001>
- Sari, S. I. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (akip). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 2(2), 218–229.
- Widaryanti, N. L. P. (2020). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Journal Ilmiah Ekonomi*, 15 No 2(32), 376–390.

Yogi Isnanto, Suharno, B. W. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 19. <https://doi.org/10.32663/jaz.v2i2.989>